

Edukasi Publik Sistem Demokrasi Indonesia dan Politik Dinasti di Yogyakarta

Tabia Hanural¹, Fadmi Fahrani², Hamdan Ainur Riza Syakirin³, Rafly Maulana Daulah⁴, Amrizal Novianto⁵, Aditya Yuda Pamungkas⁶, Muhammad Ridha Iswardhana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author

E-mail: muhammad.ridha@uty.ac.id (Muhammad Ridha Iswardhana)*

Article History:

Received: August, 2026

Revised: August, 2026

Accepted: August, 2026

Abstract: Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi demokrasi masyarakat melalui edukasi publik mengenai pelaksanaan demokrasi dan politik dinasti di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta dan Lapangan Denggung, Sleman, dengan melibatkan enam peserta, terdiri atas tiga mahasiswa dan tiga masyarakat umum. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif-partisipatif melalui penyusunan pertanyaan, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta refleksi hasil. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas peserta memahami prinsip dasar demokrasi, terutama kebebasan berpendapat, partisipasi pemilu, penegakan hukum, dan transparansi pemerintahan. Peserta juga menyampaikan pandangan kritis terhadap politik dinasti karena berpotensi mempersempit kompetisi dan meningkatkan nepotisme, meskipun sebagian menilai hubungan keluarga tidak selalu bermasalah apabila kandidat memiliki kompetensi dan integritas. Kegiatan membuka ruang dialog politik yang aman, meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa, dan menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang mendorong partisipasi kritis. Evaluasi merekomendasikan perluasan peserta, instrumen pre-post, dan forum dialog berkelanjutan.

Keywords:

Demokrasi; Edukasi publik; Literasi politik; Pendidikan kewarganegaraan; Politik dinasti

Pendahuluan

Demokrasi menempatkan warga negara sebagai pemegang hak politik yang memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin, menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengertian substantif, demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi memerlukan kesetaraan politik, kebebasan sipil, kompetisi yang terbuka, akses terhadap informasi, dan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat menilai tindakan pemerintah (Dahl, 1998). Dalam konteks Indonesia,

prinsip tersebut berkelindan dengan demokrasi Pancasila yang menempatkan partisipasi warga, musyawarah, penghormatan terhadap hak, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan kewarganegaraan (Harefa & Hulu, 2020).

Perjalanan demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998 memperlihatkan kemajuan penting berupa pemilu yang kompetitif, perluasan kebebasan politik, desentralisasi, dan meningkatnya ruang partisipasi masyarakat. Namun, kualitas demokrasi juga menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelemahan institusi, kompetisi elite, polarisasi, dan praktik kekuasaan yang dapat mempersempit ruang akuntabilitas. Power (2018) menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas institusi demokratis ketika lembaga negara dan arena politik semakin rentan digunakan secara partisan. Aspinall dan Mietzner (2019) juga menyoroti bahwa kompetisi elektoral dapat tetap berlangsung ketika praktik-praktik illiberal berkembang di dalamnya, sedangkan Mietzner (2020) menekankan bahwa kemunduran demokrasi dapat berlangsung melalui penyempitan kompetisi, politik identitas, dan konsentrasi kekuasaan tanpa menghapus pemilu secara formal.

Salah satu isu yang banyak diperdebatkan dalam demokrasi Indonesia adalah politik dinasti. Politik dinasti merujuk pada menguatnya keterlibatan anggota keluarga atau jaringan kekerabatan dalam jabatan politik, baik secara berurutan maupun bersamaan. Kehadiran kerabat dalam politik tidak secara otomatis menghapus hak konstitusional seseorang untuk dipilih, tetapi dapat menimbulkan problem demokratis ketika akses pencalonan, sumber daya, jaringan partai, dan pengaruh kekuasaan tidak tersebar secara setara. Mariana dan Husin (2017) menunjukkan bahwa demokratisasi lokal di Indonesia membuka ruang partisipasi, tetapi pada saat yang sama dapat melahirkan paradoks berupa menguatnya dinasti politik. Dedi (2022) mengaitkan politik dinasti dengan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sementara Mukhlis et al. (2024) menilai bahwa praktik dinastik dapat mengurangi kualitas kesempatan politik yang setara apabila regulasi dan mekanisme rekrutmen tidak mampu menjamin kompetisi yang sehat.

Persoalan tersebut tidak hanya menjadi isu kelembagaan, tetapi juga persoalan literasi kewarganegaraan. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu memahami hak politiknya, membedakan antara prosedur dan kualitas demokrasi, serta menilai praktik politik secara kritis. Pendidikan kewarganegaraan karena itu tidak cukup diarahkan pada penguasaan konsep, tetapi perlu membentuk warga yang aktif, kritis, dan berorientasi pada keadilan. Manik et al. (2024) menegaskan bahwa keberdayaan warga menjadi inti demokrasi dan pendidikan

kewarganegaraan perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan publik. Dalam kerangka ini, dialog langsung mengenai demokrasi dapat menjadi pengalaman belajar yang mempertemukan konsep akademik dengan persepsi dan pengalaman sehari-hari warga.

Kegiatan pengabdian ini berangkat dari kebutuhan untuk membuka ruang percakapan mengenai bagaimana demokrasi dipahami dan dinilai oleh masyarakat di sekitar Universitas Teknologi Yogyakarta. Laporan kegiatan mencatat bahwa isu politik dinasti dipilih karena dianggap relevan dengan perdebatan mengenai keadilan, kesempatan politik, kualitas kepemimpinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Sasaran kegiatan terdiri atas mahasiswa dan masyarakat umum pada usia produktif yang relatif mengikuti perkembangan politik. Pemilihan Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta dan Lapangan Deggung, Sleman, dimaksudkan untuk memperoleh percakapan dari dua lingkungan sosial yang berbeda, yaitu komunitas akademik dan ruang publik.

Tujuan pengabdian adalah: pertama, menggali pemahaman masyarakat mengenai konsep dan indikator demokrasi; kedua, memfasilitasi refleksi publik mengenai kondisi demokrasi Indonesia dan politik dinasti; ketiga, mendorong kesadaran bahwa partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara dalam pemilu; dan keempat, memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam berkomunikasi, mendengar pendapat yang berbeda, dan mengelola diskusi mengenai isu sensitif. Perubahan yang diharapkan bukan berupa perubahan sikap yang diklaim secara statistik, melainkan munculnya ruang dialog yang lebih terbuka, kemampuan mengartikulasikan pendapat, dan kesadaran awal mengenai pentingnya partisipasi serta akuntabilitas dalam demokrasi.

Metode

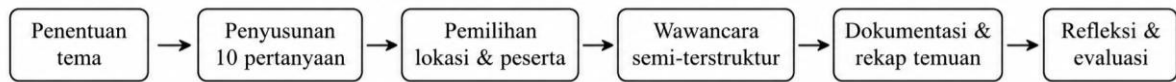
Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui wawancara reflektif. Wawancara tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen pengumpulan data, tetapi sebagai media interaksi dua arah yang mengundang peserta untuk mengingat, menjelaskan, dan menilai pengalaman mereka terhadap demokrasi. Secara metodologis, kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi fenomenologis sebagaimana tercantum dalam laporan kegiatan. Pendekatan kualitatif digunakan karena perhatian kegiatan terletak pada makna, penilaian, dan pengalaman peserta, bukan pada generalisasi statistik (Anggito & Setiawan, 2018).

Subjek kegiatan berjumlah enam orang, terdiri atas tiga mahasiswa aktif Program Studi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta tahun kedua dan ketiga serta tiga masyarakat umum yang sedang berada di Lapangan Denggung, Sleman. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 14.00-18.00 WIB. Setiap peserta memperoleh sepuluh pertanyaan semi-terstruktur yang membahas definisi demokrasi, kondisi demokrasi Indonesia, indikator demokrasi yang baik, perbandingan kondisi demokrasi dengan tahun-tahun sebelumnya, faktor yang memengaruhi demokrasi, pemahaman mengenai politik dinasti, contoh yang diketahui, dampak politik dinasti, dan harapan terhadap demokrasi Indonesia.

Perencanaan dilaksanakan melalui pembagian peran di antara enam anggota tim. Sebagian anggota bertugas menyusun konsep dan pertanyaan, sebagian bertanggung jawab mencari peserta dan perlengkapan, sedangkan anggota lain menangani dokumentasi, poster, video, serta penyusunan laporan. Lokasi dipilih dengan mempertimbangkan keragaman karakter peserta. Kampus 1 UTY dipandang sebagai ruang dengan calon peserta yang lebih terbiasa berdiskusi mengenai isu akademik, sedangkan Lapangan Denggung dipilih sebagai ruang publik untuk menjangkau masyarakat umum.

Tahapan kegiatan meliputi penentuan tema, penyusunan daftar pertanyaan, penentuan lokasi dan waktu, pembuatan poster, pelaksanaan wawancara, dokumentasi, rekapitulasi jawaban, serta refleksi. Dalam proses lapangan, tim menerapkan pendekatan sukarela dan tidak memaksa calon peserta. Hal ini penting karena laporan menunjukkan adanya penolakan dari sejumlah warga yang menganggap demokrasi dan politik dinasti sebagai topik sensitif atau merasa tidak nyaman menyampaikan pandangan politik kepada orang yang belum dikenal. Penolakan tersebut diperlakukan sebagai bagian dari dinamika kegiatan dan menjadi bahan evaluasi tentang pentingnya rasa aman dalam dialog politik.

Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan menelaah isi jawaban, keterlibatan peserta, kelancaran komunikasi, kendala lapangan, dan pengalaman tim. Laporan kegiatan menggunakan sejumlah persentase untuk menggambarkan kecenderungan respons. Sebagaimana jumlah peserta hanya enam orang, pengabdian ini melihat peserta tersebut sebagai catatan deskriptif dari laporan, bukan sebagai ukuran yang dapat digeneralisasikan kepada populasi. Keberhasilan pengabdian dinilai terutama dari terselenggaranya dialog, kemampuan peserta mengartikulasikan pandangan, munculnya tema-tema demokrasi yang relevan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama interaksi dengan masyarakat.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Wawancara Demokrasi

Hasil

Kegiatan edukasi publik berhasil dilaksanakan pada dua lokasi yang telah direncanakan. Tim mewawancarai tiga mahasiswa Program Studi Informatika di lingkungan Universitas Teknologi Yogyakarta dan tiga masyarakat umum di Lapangan Denggung. Setiap peserta menjawab sepuluh pertanyaan yang sama sehingga percakapan memiliki kerangka yang relatif konsisten, tetapi pewawancara tetap memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan jawaban. Bentuk interaksi ini membuat kegiatan tidak hanya menghasilkan daftar opini, tetapi juga menciptakan percakapan mengenai pengalaman warga dalam memahami demokrasi.

Pada aspek pemahaman demokrasi, laporan kegiatan mencatat bahwa 85% responden menunjukkan pemahaman yang baik mengenai demokrasi secara umum. Peserta menyebut kebebasan berpendapat, partisipasi dalam pemilu, penegakan hukum yang adil, dan transparansi pemerintah sebagai indikator demokrasi yang baik. Sejumlah peserta memandang kondisi demokrasi lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, khususnya karena masyarakat dinilai lebih mudah menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Pada saat yang sama, peserta menilai masih terdapat persoalan yang memerlukan perhatian, antara lain korupsi, politik uang, penegakan hukum, dan keterbatasan pendidikan politik.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kegiatan

Aspek	Temuan Lapangan	Makna bagi Pengabdian
Pemahaman demokrasi	Laporan mencatat mayoritas peserta memahami demokrasi dan menyebut kebebasan berpendapat, pemilu, penegakan hukum, serta transparansi sebagai indikator penting.	Pertanyaan reflektif dapat menjadi pintu masuk untuk menghubungkan konsep demokrasi dengan pengalaman warga.
Penilaian kondisi demokrasi	Peserta melihat adanya kemajuan dalam kebebasan berpendapat dan akses informasi, namun masih	Literasi demokrasi perlu membahas kualitas institusi, tidak hanya prosedur

Aspek	Temuan Lapangan	Makna bagi Pengabdian
	menyoroti korupsi, politik uang, hukum, dan pendidikan politik.	pemilu.
Politik dinasti	Kecenderungan utama bersifat kritis, tetapi terdapat pandangan kondisional yang menekankan kompetensi dan integritas kandidat.	Dialog membantu menunjukkan bahwa isu dinasti perlu dibaca melalui keadilan akses, kompetisi, merit, dan akuntabilitas.
Harapan warga	Demokrasi yang terbuka, responsif, adil, inklusif, dan memberi ruang partisipasi lebih luas.	Pengabdian dapat diarahkan pada forum diskusi yang memperkuat kapasitas warga menyampaikan aspirasi.
Kendala	Sebagian calon peserta menolak karena sensitivitas isu dan keengganan menyampaikan opini politik.	Kegiatan berikutnya memerlukan jaminan kerahasiaan, pendekatan etis, serta lingkungan dialog yang lebih aman.

Catatan: persentase dalam laporan kegiatan dibaca sebagai informasi deskriptif karena jumlah peserta hanya enam orang.

Pandangan mengenai politik dinasti lebih beragam. Laporan mencatat kecenderungan sekitar 70% peserta menilai politik dinasti berpotensi berdampak negatif karena dapat menempatkan individu berdasarkan kepentingan kelompok, memperbesar peluang nepotisme dan korupsi, memusatkan kekuasaan pada keluarga tertentu, serta menghambat regenerasi pemimpin baru. Sementara itu, sekitar 30% peserta tidak melihat hubungan keluarga sebagai masalah dengan sendirinya apabila individu yang menduduki jabatan memiliki kompetensi dan integritas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak sepenuhnya menilai politik dinasti secara hitam-putih; perhatian mereka terutama tertuju pada kualitas kompetisi, kapasitas kandidat, keadilan akses, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Harapan peserta terhadap demokrasi Indonesia mengerucut pada tiga tema. Pertama, demokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kedua, kebijakan yang lebih adil dan inklusif agar akses terhadap kesempatan sosial dan politik tidak ditentukan oleh latar belakang tertentu. Ketiga, partisipasi politik yang lebih luas sehingga arena politik tidak hanya didominasi nama besar atau

jaringan keluarga. Harapan tersebut menunjukkan bahwa peserta memahami demokrasi bukan hanya sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai relasi antara pemerintah, hukum, kesempatan politik, dan keterlibatan warga.

Bagi tim mahasiswa, kegiatan menghasilkan pembelajaran praktis yang tidak diperoleh hanya melalui pembacaan materi kelas. Anggota tim belajar menyiapkan pertanyaan, mencari peserta, menjelaskan tujuan kegiatan, mendengarkan jawaban, mempertahankan sikap netral, serta bekerja sama dalam dokumentasi dan pengolahan hasil. Laporan juga mencatat peningkatan pemahaman tim terhadap keberagaman pandangan masyarakat dan pentingnya komunikasi yang sopan ketika membahas isu politik. Dengan demikian, manfaat kegiatan terjadi dalam dua arah: masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan dan merefleksikan pandangan, sedangkan mahasiswa memperoleh pengalaman kewarganegaraan berbasis interaksi sosial.

Kendala utama muncul di Lapangan Denggung. Sejumlah calon peserta menolak diwawancarai karena topik dianggap sensitif dan mereka enggan mengungkapkan opini politik pribadi kepada orang yang belum dikenal. Situasi ini memperlihatkan bahwa ruang dialog demokrasi tidak otomatis terbentuk hanya karena tersedia kebebasan berbicara. Rasa aman, kepercayaan terhadap pewawancara, cara membuka percakapan, serta jaminan bahwa pendapat tidak akan digunakan untuk merugikan peserta merupakan unsur penting. Tim mengatasi kendala tersebut dengan pendekatan ramah, tidak memaksa, dan mengandalkan lokasi kampus sebagai ruang alternatif untuk memperoleh peserta yang lebih terbuka terhadap diskusi politik.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara di Kampus 1 UTY dan Lapangan Denggung

Diskusi

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa edukasi publik dapat berfungsi sebagai metode pengabdian yang bersifat dialogis ketika peserta tidak hanya diminta memberikan jawaban, tetapi juga diajak menimbang alasan di balik penilaiannya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, model semacam ini penting karena kemampuan demokratis tidak tumbuh hanya melalui hafalan definisi. Warga perlu berlatih mengemukakan argumen, mendengar pandangan berbeda, dan

menghubungkan nilai demokrasi dengan isu yang hadir dalam kehidupan politik. Gagasan tersebut selaras dengan Manik et al. (2024) yang menempatkan keberdayaan dan peran aktif warga sebagai unsur penting dalam pembentukan warga demokratis.

Pemahaman peserta yang menempatkan kebebasan berpendapat, partisipasi pemilu, penegakan hukum, dan transparansi sebagai indikator demokrasi menunjukkan adanya kesadaran terhadap dimensi prosedural sekaligus substantif. Dahl (1998) menjelaskan bahwa demokrasi memerlukan partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kontrol terhadap agenda, dan inklusi warga. Dengan kerangka tersebut, jawaban peserta dapat dibaca sebagai pengenalan awal terhadap prasyarat demokrasi yang lebih luas daripada sekadar keberadaan pemilu. Kegiatan pengabdian menjadi relevan karena membantu mempertemukan pemahaman normatif tersebut dengan evaluasi peserta terhadap kondisi yang mereka rasakan.

Pada sisi lain, penilaian bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan dalam kebebasan berpendapat dan akses informasi tetapi masih menghadapi persoalan korupsi, hukum, dan politik uang memperlihatkan adanya jarak antara demokrasi elektoral dan kualitas demokrasi. Literatur tentang Indonesia menunjukkan bahwa institusi elektoral yang bertahan tidak otomatis menghilangkan praktik illiberal atau problem akuntabilitas. Power (2018) menyoroti pelemahan kualitas institusi demokrasi, Aspinall dan Mietzner (2019) menunjukkan ketegangan antara pluralisme dan demokrasi dalam kompetisi electoral. Sedangkan Mietzner (2020) menggambarkan bagaimana penyempitan kompetisi dan konsentrasi kekuasaan dapat berjalan di dalam sistem yang tetap menyelenggarakan pemilu. Literatur ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa peserta telah memahami seluruh proses tersebut, tetapi untuk menunjukkan bahwa isu yang mereka sebut memiliki relevansi dengan perdebatan akademik mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

Perbedaan pendapat mengenai politik dinasti menjadi bagian paling penting dari proses dialog. Sebagian besar peserta dalam laporan melihat risiko nepotisme, korupsi, dominasi keluarga, dan terhambatnya regenerasi politik. Kekhawatiran ini sejalan dengan Mariana dan Husin (2017), yang melihat politik dinasti sebagai salah satu paradoks demokratisasi lokal, serta Dedi (2022), yang mengaitkannya dengan potensi penyimpangan kekuasaan. Studi yang lebih baru juga menekankan bahwa politik dinasti menjadi problem ketika struktur pencalonan dan kekuasaan menciptakan ketidakseimbangan kesempatan serta memperlemah kompetisi yang terbuka (Mukhlis et al., 2024). Dengan kata lain, isu utama bukan semata-mata

hubungan keluarga, tetapi bagaimana hubungan tersebut berinteraksi dengan rekrutmen partai, akses sumber daya, merit, dan akuntabilitas.

Pandangan minoritas yang menilai dinasti politik tidak selalu negatif apabila kandidat kompeten juga penting dipertahankan dalam pembahasan. Pandangan tersebut mengingatkan bahwa pendidikan politik sebaiknya tidak berubah menjadi indoktrinasi. Pengabdian yang berorientasi demokrasi perlu memberi ruang bagi argumen yang berbeda selama dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah nilai metode wawancara reflektif: pelaksana dapat mengajak peserta membedakan antara hak individu untuk mencalonkan diri dan risiko struktural ketika kekuasaan, sumber daya, serta proses rekrutmen terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Proses ini mendorong literasi politik yang lebih analitis daripada sekadar pemberian label positif atau negatif.

Temuan mengenai penolakan calon peserta juga memberikan pembelajaran substantif. Kebebasan berpendapat secara formal belum tentu membuat setiap orang nyaman membahas politik secara terbuka. Ketidaknyamanan dapat berkaitan dengan sensitivitas topik, ketidakpercayaan, kekhawatiran atas dampak sosial, atau ketidakjelasan penggunaan informasi. Karena itu, forum pengabdian mengenai politik harus menempatkan etika interaksi sebagai bagian dari desain kegiatan. Pewawancara perlu menyampaikan tujuan, memberi pilihan untuk tidak menjawab, tidak memaksa partisipasi, menghindari pertanyaan yang mengarahkan, dan menjelaskan bentuk dokumentasi. Praktik seperti ini penting untuk membangun ruang publik yang aman dan menghormati otonomi warga.

Dari perspektif proses pengabdian, capaian kegiatan paling nyata terletak pada terbukanya percakapan dan pembelajaran mahasiswa. Kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test, sehingga tidak tersedia dasar untuk menyimpulkan peningkatan pengetahuan peserta secara terukur. Demikian pula, enam peserta tidak cukup untuk merepresentasikan masyarakat Yogyakarta atau Indonesia. Karena itu, hasil perlu dipahami sebagai refleksi mikro terhadap bagaimana sejumlah warga mengartikulasi demokrasi dan politik dinasti. Keterbatasan ini justru menunjukkan arah pengembangan kegiatan: pengabdian selanjutnya dapat menggunakan peserta yang lebih beragam, instrumen pre-post sederhana, lembar refleksi anonim, diskusi kelompok terarah, dan kegiatan berulang agar perubahan pemahaman dapat diamati dengan lebih sistematis.

Program lanjutan juga dapat mengembangkan format dari wawancara individual menjadi klinik literasi demokrasi atau forum dialog warga. Materi dapat memuat hak dan kewajiban politik, cara memeriksa informasi politik, indikator pemilu berintegritas, mekanisme pengawasan publik, serta analisis rekrutmen

politik dan konflik kepentingan. Pelibatan organisasi mahasiswa, komunitas lokal, penyelenggara pemilu, dan akademisi dapat memperluas jangkauan sekaligus menjaga netralitas substansi. Dalam kerangka tersebut, pengabdian tidak diarahkan untuk membentuk pilihan politik tertentu, tetapi untuk memperkuat kapasitas warga menilai informasi dan mengambil keputusan secara mandiri. Pendekatan semacam ini relevan dengan prinsip pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan warga kritis, aktif, dan bertanggung jawab (Harefa & Hulu, 2020; Manik et al., 2024).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian mengenai sistem demokrasi Indonesia dan politik dinasti melalui edukasi publik berhasil membuka ruang percakapan antara mahasiswa dan masyarakat mengenai kualitas demokrasi. Enam peserta dari lingkungan Kampus 1 Universitas Teknologi Yogyakarta dan Lapangan Deggung mampu mengidentifikasi unsur demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi pemilu, penegakan hukum, dan transparansi. Peserta juga menyampaikan evaluasi kritis terhadap persoalan korupsi, politik uang, pendidikan politik, dan praktik dinasti. Pandangan mengenai politik dinasti tidak sepenuhnya seragam, tetapi kecenderungan utama menyoroti risiko nepotisme, konsentrasi kekuasaan, dan terbatasnya regenerasi politik, sementara sebagian peserta menekankan kompetensi dan integritas individu.

Secara reflektif, kegiatan menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di ruang publik perlu menggabungkan pengetahuan dengan dialog. Wawancara memungkinkan peserta menyampaikan pandangan sekaligus mendorong mahasiswa berlatih mendengar, bertanya, dan merespons perbedaan secara etis. Sehubungan jumlah peserta terbatas dan tidak terdapat pengukuran pre-post, kegiatan ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasikan persepsi masyarakat atau mengklaim perubahan pengetahuan secara kuantitatif. Program berikutnya disarankan melibatkan peserta yang lebih luas, menyediakan jaminan anonimitas, menggunakan instrumen evaluasi sebelum-sesudah, serta membangun forum dialog berkelanjutan. Dengan pengembangan tersebut, pengabdian dapat memberi kontribusi lebih kuat terhadap literasi politik, partisipasi kritis, dan pembentukan budaya demokrasi yang terbuka serta bertanggung jawab.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat di sekitar Lapangan Denggung yang bersedia berpartisipasi. Penghargaan khusus diberikan kepada calon peserta yang memilih untuk tidak diwawancarai; keputusan tersebut menjadi pengingat penting bahwa partisipasi dalam dialog politik harus bersifat sukarela dan menghormati kenyamanan setiap warga.

Daftar Referensi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Arisanto, P. T., Rizky, L., Wibawa, A., Pratiwi, T. S., Iswardhana, M. R., & Chotimah, H. C. (2025). Pengabdian masyarakat “We Buy We Distribute” sebagai upaya membantu petani di Ngablak, Magelang survive. *Kesejahteraan Bersama: Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat*, 2(3), 231–239. <https://doi.org/10.62383/bersama.v2i3.2071>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Dedi, A. (2022). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92-101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Embrio Publisher.
- Iswardhana, M. R., Maharani, G. A., Nurjannah, L., & Wulandari, R. (2025a). Pengabdian di SD Negeri Nogotirto: Dari sudut Yogyakarta menatap dunia — Petualangan seru jelajahi dunia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(12), 2401–2408. <https://doi.org/10.58812/jpws.v4i12.3209>
- Iswardhana, M. R., Srikandi, D. A., Maghribi, N. F., & Aulia, R. A. (2025b). Pengabdian mengatasi keresahan masyarakat Yogyakarta terhadap perokok aktif di tempat umum. *East Journal of Innovative Community Services*, 3(2), 105–114. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v3i02.360>
- Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Rizaldi, E., & Arkhan, S. (2025c). Pengabdian kepada masyarakat kampanye utamakan keselamatan berkendara pada Mei 2025. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(5), 726–733. <https://doi.org/10.58812/jpws.v4i05.2404>

- Manik, T. S. M., Purwantiningsih, A., & Riyanti, D. (2024). Konstruksi ideal warga negara demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan: Suatu tinjauan literatur. *Integralistik*, 35(1). <https://doi.org/10.15294/keyntc11>
- Mariana, D., & Husin, L. H. (2017). Democracy, local election, and political dynasty in Indonesian politics. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.13998>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021-1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161-178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>
- Mukhlis, M. M., Ilmar, A., Maskun, Aswanto, & Tajuddin, M. S. (2024). Dynastic politics in regional elections: Challenges to democracy and the need for legal reform in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 565-587. <https://doi.org/10.31078/jk2143>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum